

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses pemberdayaan Desa Wisata Jarum telah berjalan melalui ketiga tahapan dan ditemui permasalahan bahkan sejak tahapan oenyadaran, dengan tingkat ketercapaian yang berbeda-beda dengan posisi masyarakat sebagai subjek yang tidak seragam di setiap tahapannya. Tahap penyadaran terlaksana secara organik karena bertumpu pada tradisi batik tulis yang telah hidup di masyarakat jauh sebelum program desa wisata terbentuk. Dalam tahap ini, masyarakat khususnya komunitas pengrajin batik sesungguhnya adalah subjek yang memulai kesadaran dari dalam, karena kesadaran tentang nilai ekonomi batik tumbuh secara mandiri tanpa didorong oleh program apapun. Namun kesadaran ini terbatas pada ekosistem batik semata karena pelaku usaha non-batik seperti cobek, gamelan, dan kayu tidak terfasilitasi sebagai subjek yang setara dalam proses penyadaran, sementara kesadaran kelembagaan tentang konsep desa wisata tetap datang dari luar melalui pemerintah desa.

Pada tahap peningkatan kapasitas, seluruh inisiatif program datang dari pihak luar yaitu dinas melalui sosialisasi konsep desa wisata lewat Pokdarwis dan tokoh masyarakat, pelatihan digital marketing oleh Disbudporapar Kabupaten Klaten, edukasi e-commerce melalui program KKN mahasiswa UNS, hingga bantuan alat produksi bagi pengrajin cobek dan kayu. Masyarakat sebatas merespons dan memanfaatkan program-program tersebut dengan baik, namun tidak terlibat dalam merancanginya. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan

masyarakat mengidentifikasi dan mengajukan kebutuhan kapasitasnya secara kolektif, sehingga subjektivitas masyarakat pada tahap ini kuat dalam menjalankan kapasitas yang sudah dimiliki, namun lemah dalam menentukan arah program yang ditujukan untuk mereka.

Kemandirian yang dihasilkan dari kedua tahap tersebut masih bersifat timpang. Kemandirian ekonomi-produksi telah tercapai secara nyata dan ini merupakan bentuk subjektivitas masyarakat yang paling kuat, karena dibangun secara mandiri oleh masing-masing pelaku usaha jauh sebelum program desa wisata hadir. Namun kemandirian dalam tata kelola dan promosi wisata masih parsial dan rentan. Inisiatif masyarakat dalam mengelola desa wisata memang ada dan nyata melalui Pokdarwis secara mandiri mengelola paket wisata, homestay, dan event Bersih Desa namun terfragmentasi dan hanya berputar di dalam lingkaran pelaku batik yang sudah terhubung, tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat secara kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan di Desa Wisata Jarum belum sepenuhnya tuntas dimana masyarakat telah berdaya dalam mengelola usaha produktifnya secara mandiri, namun belum sepenuhnya berdaya sebagai subjek kolektif yang mengendalikan arah pengembangan desa wisata secara utuh.

Tantangan yang dihadapi Desa Wisata Jarum muncul dengan saling berkaitan sehingga menghambat tercapainya kemandirian penuh. Secara kelembagaan, tantangan yang paling mendasar adalah bahwa tata kelola desa wisata berjalan secara top-down tanpa mekanisme partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak pernah benar-benar difasilitasi

untuk menjadi subjek yang merancang dan mengendalikan proses pemberdayaannya sendiri. Di atas kondisi ini, dominasi batik dalam ekosistem desa wisata tidak hanya terbentuk dari luar, melainkan direproduksi dari dalam oleh masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah desa secara bersamaan karena tidak ada satu pun aktor yang memiliki mekanisme kolektif untuk mengintegrasikan potensi non-batik secara bermakna. Akibatnya, diversifikasi potensi tidak terwujud bukan karena tidak ada potensi, melainkan karena tidak ada inisiatif kolektif yang cukup kuat untuk menggerakkannya dari dalam masyarakat itu sendiri. Pokdarwis yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat luas pun belum berfungsi secara inklusif karena informasi dan peluang lebih banyak berputar di antara anggotanya sendiri, sementara UMKM non-batik dan masyarakat di luar lingkaran Pokdarwis sulit mengakses manfaat program desa wisata secara merata. Di sisi lain, minimnya tenaga terampil membuat pelaku usaha tidak mampu mengadopsi teknologi digital secara mandiri, sementara program pelatihan yang datang tanpa pendampingan lanjutan tidak cukup untuk menutup kesenjangan tersebut. Hambatan sesungguhnya terletak pada belum terwujudnya masyarakat sebagai subjek kolektif yang utuh yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga mampu bersama-sama merancang, mengelola, dan mengembangkan desa wisatanya sendiri secara merata dan berkesinambungan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem pemberdayaan Desa Wisata Jarum.

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, perlu merancang ulang mekanisme sosialisasi dan pelatihan agar tidak hanya menjangkau pelaku usaha yang sudah terhubung dengan jaringan Pokdarwis. Program pemberdayaan sebaiknya dirancang berbasis pemetaan potensi yang menyeluruh, sehingga pelaku usaha dari sektor non-batik seperti pengrajin cobek batu, gamelan, dan kerajinan kayu turut mendapat perhatian yang proporsional sejak tahap kesadaran. Selain itu, pelatihan pemasaran digital perlu diperdalam hingga menyentuh strategi bisnis digital yang praktis dan aplikatif, bukan sekadar berhenti pada pengenalan platform, dan harus diikuti dengan pendampingan lanjutan yang terstruktur agar ilmu yang diterima benar-benar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha.

Bagi Pemerintah Desa Jarum, perlu membangun mekanisme distribusi informasi yang tidak semata-mata mengandalkan Pokdarwis sebagai satu-satunya kanal. Pelaku usaha dari sektor-sektor yang selama ini berada di luar jaringan Pokdarwis perlu dijangkau secara aktif melalui forum-forum yang memang menjadi ruang berkumpul mereka, bukan hanya melalui pertemuan formal yang cenderung dihadiri oleh kelompok yang sama. Selain itu, persoalan regenerasi pengrajin perlu mulai ditempatkan sebagai agenda yang direncanakan secara konkret, misalnya melalui program magang atau skema insentif bagi pemuda desa yang bersedia meneruskan tradisi kerajinan sebagai mata pencaharian utama.

Pokdarwis Desa Jarum, perlu memperkuat sistem pembagian tugas internal yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, sehingga konsistensi pelayanan tidak bergantung sepenuhnya pada ketersediaan individu tertentu. Selain itu, Pokdarwis

perlu secara aktif merancang program atau kegiatan yang relevan bagi pelaku usaha non-batik, agar keterbukaan keanggotaan yang selama ini bersifat formal dapat benar-benar terwujud dalam keterlibatan yang merata. Pengembangan paket wisata yang mengintegrasikan potensi gamelan, cobek batu, dan kerajinan kayu sebagai atraksi pendamping batik dapat menjadi langkah konkret untuk membangun ekosistem desa wisata yang lebih inklusif. Selain itu, kapasitas promosi digital yang mandiri dan berkelanjutan harus semakin ditingkatkan agar ruang gerak pengembangan desa tidak terus-menerus dibatasi oleh ada tidaknya pameran eksternal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dari dalam desa.